

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum (sumber: [www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang](http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang)). DPR atau badan legislatif memiliki beberapa fungsi penting dalam berjalannya suatu negara, diantaranya adalah fungsi legislatif, fungsi kontrol, fungsi lainnya. Menurut teori yang berlaku tugas utama legislatif terletak di bidang perundang-undangan, sekalipun ia tidak mempunyai monopoli di bidang itu. Untuk membahas rancangan undang-undang sering dibentuk panitia-panitia yang berwenang untuk memanggil menteri atau pejabat lainnya untuk dimintai keterangan. Fungsi kedua adalah fungsi kontrol, dengan semakin berkurangnya pengaruh badan legislatif, maka peranannya di bidang pengawasan dan kontrol bertambah menonjol. Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif, agar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkannya. Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dan melalui hak-hak kontrol yang khusus, seperti hak bertanya, interpelasi (meminta keterangan), angket (mengadakan penyelidikan sendiri), mosi (ketika ada kebijakan pemerintah yang salah). Fungsi yang terakhir adalah fungsi lainnya, bagi anggota badan legislatif, fungsi lainnya ini adalah sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan beraneka ragam pandangan yang berkembang dinamis di masyarakat (Miriam Budiardjo, 2008 : 324-326).

Namun dalam pelaksanaan tugasnya, ada anggota DPR yang malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan membuat kinerja DPR menjadi tidak produktif. Contohnya beberapa bulan belakangan DPR tercoreng dengan ulah yang dilakukan oleh ketuanya, yaitu Setya Novanto atas dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden pada pemufakatan jahat terkait kontrak PT. Freeport Indonesia.

Kasus pencatutan nama presiden terkait perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia bermula pada 16 November 2015. ketika Sudirman Said yang merupakan Menteri ESDM dan penanggung jawab sektor tambang, melaporkan ketua DPR Setya Novanto ke MKD. "Saya dalam pertemuan dengan Majelis Kehormatan DPR (MKD) telah menjelaskan nama, waktu, dan tempat kejadian dan pokok pembicaraan yang dilakukan oleh oknum salah satu anggota DPR dengan pimpinan PT Freeport Indonesia agar ditindaklanjuti," kata Sudirman. Menanggapi hal itu MKD sempat bingung untuk melanjutkan kasus ini.

Hingga pada 23 November 2015, Majelis Kehormatan Dewan menggelar sidang pertama dugaan ketua DPR Setya Novanto (Setnov) memalak 20 persen saham perseroan dan meminta jatah 49 persen saham proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka, Papua pada PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Dalam sidang pertama itu, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang akan menguatkan usulan agar sidang perkara Setnov bisa digelar secara terbuka, dan dapat dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, karena permintaan Setya Novanto sidang selanjutnya dilaksanakan tertutup.

Pada 7 Desember 2015 Sidang pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ketua DPR, Setya Novanto, digelar tertutup di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dalam sidang itu, Setya sempat mempermasalahkan *legal standing* Menteri ESDM, Sudirman Said, sebagai pihak yang melaporkannya ke MKD. Merasa dirinya mulai tersudut, sebelum keputusan akhir MKD, tepatnya pada tanggal 14 Desember 2015 Setya Novanto Mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR (<http://www.merdeka.com/peristiwa/kronologis-lengkap-kasus-papa-minta->

saham-sampai-bikin-setnov-mundur.html / diakses pada 23 Februari 2016, pada pukul 20:00).

Kasus ini tentunya sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap DPR mengingat, kasus ini menambah rentetan citra buruk DPR dimata masyarakat. DPR yang seharusnya berfungsi sebagai penyambung aspirasi rakyat dan juga sebagai pengawas lembaga eksekutif malah melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Masyarakat dibuat geram dan memunculkan aksi-aksi seperti yang dilakukan oleh BEM UI bersama dengan mahasiswa kampus lainnya menggelar aksi “menjaga Indonesia” yang dilaksanakan pada 11 Desember 2015 di halaman gedung DPR (sumber: <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/08/09430981/Desak.Setya.Novanto.Mundur.Mahasiswa.Bakal.Demonstrasi.pada.11.Desember>). Berdasarkan keterangan Adji Alfaraby, peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) saat menghadiri konferensi pers refleksi akhir tahun analisis survey LSI 17 Desember 2015 lalu, hanya 40% masyarakat yang masih percaya kepada DPR, sementara 51,8% tidak percaya, dan 8,2% tidak menjawab. Adji juga menambahkan bahwa tahun 2015 merupakan titik terendah kepercayaan masyarakat terhadap DPR pada 10 tahun terakhir ini. Dari hasil survei, kata Adjie, bisa dilihat bahwa ada kecenderungan ketidakpercayaan publik terhadap Koalisi Merah Putih yang saat ini mendominasi kekuatan di DPR. Salah satu penyebabnya adalah DPR dianggap tidak produktif selama 1 tahun ini. Dalam 1 tahun, DPR periode 2014-2019 itu hanya menyelesaikan 3 undang-undang dari target 39 RUU. Kasus pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakilnya Fadli Zon dengan calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta kasus 'papa minta saham' kian memperburuk citra lembaga wakil rakyat itu. "Selanjutnya, terkait tendensi pemberitaan kasus papa minta saham yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dinilai sebagai kasus yang merendahkan martabat DPR. Karena publik pun menanggapi secara sinis kasus ini," papar Adjie. (<http://politik.news.viva.co.id/news/read/712564-survei--kepercayaan-publik-terhadap-dpr-di-titik-nadir> / diakses pada 24 Februari 2016, pada pukul 17:29).

Kasus ini cukup mendapat tempat di masyarakat, karena baru pada kasus ini ada pejabat negara yang berani menyeret presiden dan wakil presiden untuk

pemufakatan jahat. Sehingga, kasus ini hangat diperbincangkan di berbagai media. Media adalah forum yang sangat berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat yang bertaraf Nasional maupun Internasional dengan tujuan menghibur atau memberikan informasi. Media dibagi menjadi media massa dan new media, media massa diantaranya televisi, radio, majalah, dan koran (McQuail 1987 : 3).

Media seperti yang kita lihat bukanlah saluran yang bebas, yang memberitakan sebuah peristiwa apa adanya. Media justru mengkonstruksi sedemikian rupa realitas. Ada yang dimunculkan karena dirasa penting, dan juga ada yang dihilangkan. Media yang peneliti pilih adalah new media, yaitu media online. New media ataupun yang disebut media online menurut Flew (2005) adalah sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi digital yang terkomputerisasi serta terhubung dalam jaringan, media yang merepresentasikan media baru ini adalah internet (sumber: <http://www.komunikasipraktis.com/2014/08/pengertian-media-baru-dan-jenis-jenisnya.html>, diakses pada 27 Februari 2016). Sekarang ini penggunaan media online sudah sangat tinggi dimasyarakat. Media online mendapat tempat di masyarakat sebagai alat untuk komunikasi, hiburan, dan tentunya pencarian informasi.



**Gambar 1.1**

Sumber : id.technisia.com

(diakses pada 27 Februari 2016, pukul 20:38)

Saat ini sudah banyak portal-portal berita online yang menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi, diantaranya seperti kompas.com, viva.co.id , mediaindonesia.com , okezone.com , detik.com . Berdasarkan situs alexa.com, kompas.com masuk dalam lima portal berita yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Kompas.com berada pada peringkat empat setelah detik.com, tribunnews.com, dan liputan6.com. Dalam pemberitaan mengenai pencatutan nama presiden terkait kontrak PT. Freeport Indonesia, portal berita online kompas.com telah memberitakan sebanyak 861 kali, terhitung dari tanggal 16 November 2015 sampai dengan 11 Februari 2016. Itu menandakan bahwa kompas.com memberi perhatian lebih terhadap kasus itu, dan juga berita ini juga sempat menjadi headline di kompas.com.

No	Nama Situs	Peringkat (Indonesia)	Peringkat (Dunia)	Rata-rata waktu mengunjungi
1	Detik.com	5	187	9,31 menit
2	Tribunnews.com	7	208	7,07 menit
3	Liputan6.com	8	263	5,37 menit
4	Kompas.com	11	416	7,29 menit
5	Okezone.com	14	619	8,50 menit

**Tabel 1.1**

*Sumber : <http://www.alex.com/topsites/countries;0/ID>*

(diakses pada 24 Februari 2016, pukul 16:49)

Pemberitaan mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Setya Novanto ini dibingkai berbeda-beda oleh berbagai media. Masing-masing media memiliki pandangan tersendiri bagaimana memberitakan suatu peristiwa. Selain sebagai sarana penyebar informasi, media juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tindakan khalayak dan mempengaruhi cara pandang khalayak dalam memandang sebuah peristiwa. Seperti yang diungkapkan oleh Zaenuddin dalam bukunya, keberadaan media dianggap sebagai ‘kekuatan keempat ( The Fourth State ) dalam sistem politik kenegaraan. Media sering dimanfaatkan sebagai pembela kebenaran dan keadilan, sekaligus juga sebagai pembentuk opini publik (Zaenuddin, 2010 : 10). Terkait pembentukan opini publik, media membentuk opini publik dengan cara mengkonstruksi peristiwa yang ada, dan diberitakan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Setelah dikonsumsi oleh masyarakat, maka muncullah opini publik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis framing. Analisis framing secara sederhana dapat dijadikan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media (Eriyanto, 2002 : 76). Analisis framing merupakan sebuah metode penelitian mengenai media massa yang dasar penelitiannya berasal dari teori konstruksi sosial. Dalam teori tersebut dipaparkan bahwa, realitas yang dilihat atau dibaca di media massa tersebut bukan seperti yang benar-benar terjadi , melainkan hasil konstruksi dari media yang memberitakan.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, permasalahan yang ingin diangkat oleh penulis adalah bagaimanakah pembingkaiian berita kompas.com mengenai kasus pencatutan nama presiden terkait perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia dalam model Robert N. Entman yang melihat dalam dua dimensi besar yaitu, seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari sebuah realitas. Dalam fokus penelitian, muncul pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana seleksi isu yang ditampilkan dalam pemberitaan kasus pencatutan nama presiden terkait kontrak PT. Freeport Indonesia di Kompas.com ?
2. Bagaimana penonjolan aspek yang ditampilkan dalam pemberitaan kasus pencatutan nama presiden terkait kontrak PT. Freeport Indonesia di Kompas.com ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah pembingkaiian berita Kompas.com mengenai kasus pencatutan nama presiden terkait kontrak PT. Freeport Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi bidang ilmu komunikasi dalam meneliti sebuah pemberitaan dengan metode analisis framing.
2. Penelitian ini juga dapat menjadi studi banding bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian yang sama di masa yang akan datang.
3. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menganalisis suatu berita secara lebih detail.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi informasi serta masukan bagi pihak media *online* Kompas.com
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian atau studi lanjutan di masa yang akan datang.

#### 1.5 Tahapan Penelitian

1. Mencari dan mengumpulkan data berupa berita mengenai kasus pencatutan nama presiden terkait kontrak PT. Freeport Indonesia dari Kompas.com.
2. Menganalisis naskah berita berdasarkan perangkat framing Robert N. Entman.
3. Membuat Kesimpulan

#### 1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan secara *online* dengan mengakses situs Kompas.com.

##### 1.6.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian akan dilangsungkan selama enam bulan yaitu dari bulan Februari 2016 sampai dengan Juli 2016. Rincian kegiatan penelitian terdapat dalam tabel berikut :

No	Tahapan	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Pengajuan Judul Proposal						
2	Penyusunan Proposal						

3	Pendaftaran Sidang Proposal						
4	Sidang Proposal						
5	Penelitian						
6	Pendaftaran Sidang Skripsi						
7	Sidang Skripsi						

**Tabel 1.2**

*Sumber : Olahan Penulis (2016)*